

Editor:

Muhammad Ikmal Setiadi
Cosmas Manukallo Danga
Rianto

OPTIMALISASI SINERGITAS TNI, POLRI DAN KEMENTERIAN/LEMBAGA

Dalam Penanggulangan Kelompok Teroris
Papua Guna Mewujudkan Keutuhan NKRI



Rantau Isnur Eka
Rizerius Eko Hadisancoko
Lukman Yudho Prakoso



OPTIMALISASI SINERGITAS TNI, POLRI DAN KEMENTERIAN/LEMBAGA

**Dalam Penanggulangan Kelompok Teroris
Papua Guna Mewujudkan Keutuhan NKRI**

**Rantau Isnur Eka
Rizerius Eko Hadisancoko
Lukman Yudho Prakoso**



**OPTIMALISASI SINERGITAS TNI, POLRI DAN KEMENTERIAN/LEMBAGA
DALAM PENANGGULANGAN KELOMPOK TERORIS PAPUA GUNA
MEWUJUDKAN KEUTUHAN NKRI**

Penulis:

Rantau Isnur Eka, Rizerius Eko Hadisancoko, Lukman Yudho Prakoso.

Desain Cover:

Septian Maulana

Sumber Ilustrasi:

www.freepik.com

Tata Letak:

Handarini Rohana

Editor:

**Muhammad Ikmal Setiadi
Cosmas Manukallo Danga
Rianto**

ISBN:

978-623-459-587-1

Cetakan Pertama:

Agustus, 2023

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA MEDIA UTAMA

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

Telepon (022) 87355370

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT bahwa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan buku yang berjudul OPTIMALISASI SINERGITAS TNI, POLRI DAN KEMENTERIAN/LEMBAGA DALAM PENANGGULANGAN KELOMPOK TERORIS PAPUA GUNA MEWUJUDKAN KEUTUHAN NKRI. Penulisan buku ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu. Akhir kata, Semoga maksud dan tujuan serta tekad yang mulia dari Penulis melalui buku ini dapat terwujud. Penulis juga berharap buku ini dapat meningkatkan semangat dalam mewujudkan Pertahanan Indonesia yang lebih tangguh dalam mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Namun, penulis menyadari buku ini tak lepas dari kekurangan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan permohonan maaf serta terbuka untuk kritik dan saran demi perbaikan di masa mendatang.

Jakarta, Agustus 2023

Penulis

PRAKATA

Sungguh sebuah kebahagiaan dan rasa syukur yang mendalam bagi editor karena dapat berkontribusi menyelesaikan buku yang berjudul Optimalisasi Sinergitas Tni, Polri Dan Kementerian/Lembaga Dalam Penanggulangan Kelompok Teroris Papua Guna Mewujudkan Keutuhan NKRI.

Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah strategis perlu mempersiapkan segala strategi dan upaya-upaya dalam menghadapi ancaman di wilayah maritim tersebut yang menjadi respons atas Perkembangan Lingkungan Strategis di kawasan Indo-Pasifik, Samudera Hindia dan sekitarnya yang menjadi isyarat akan rawannya ancaman di kawasan maritim dan perlu mempersiapkan pertahanan maritim yang kuat untuk mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Situasi keamanan di Papua belakangan ini kembali menunjukkan eskalasi dan cenderung memanas. Menanggapi eskalasi dan kekerasan yang terjadi di Papua beberapa waktu ini, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memastikan pemerintah telah mengkategorikan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua serta seluruh organisasi dan orang-orang yang tergabung di dalamnya, dan yang mendukung gerakan tersebut, sebagai teroris. Situasi keamanan yang meningkat di wilayah Papua menjadi urgensi diperlukannya pendekatan yang komprehensif antara TNI, Polri, Satkowil, Pemda, K/L untuk bersinergi dalam rangka meredam konflik Papua. Sinergisitas antara lembaga / kementerian telah terselenggara baik dalam bentuk dialog, pendekatan soft power dalam kerangka OMSP, maupun pemberdayaan terhadap masyarakat setempat dengan bersinergi bersama pemerintah lokal. Namun, dengan masih berlangsungnya konflik dan beberapa eskalasi yang terjadi, hal ini menunjukkan sinergisitas tersebut masih belum cukup optimal

Editor berharap, buku ini tidak hanya sekedar tulisan semata, melainkan dapat dijadikan referensi sebagai pedoman pengambilan keputusan kebijakan dalam upaya memperkuat pertahanan Nirmiliter.

Jakarta, Agustus 2023

Editor

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
PRAKATA	iv
DAFTAR ISI	vi
PERTAHANAN NEGARA DAN KONTRA TERORISME	1
A. Pendahuluan	1
B. Optimalisasi	8
C. Sinergitas	9
D. Kontra Insurgensi	10
E. Terorisme	12
F. Pertahanan Negara	14
KRONOLOGIS KONFLIK DI PAPUA	17
A. Latar Belakang Perlawanan Bangsa Papua	17
B. Sinergitas TNI, Polri, dan Kementerian/Lembaga di Papua Dalam Penanggulangan Kelompok Teroris di Papua	22
C. Optimalisasi Sinergitas TNI, Polri, dan Kementerian/Lembaga dalam Penanggulangan Kelompok Teroris di Papua Guna Mewujudkan Keutuhan NKRI	32
RESOLUSI KONFLIK DI PAPUA	45
A. Kesimpulan dan Rekomendasi	45
DAFTAR PUSTAKA	57

PERTAHANAN NEGARA DAN KONTRA-TERRORISME

A. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai negara berdaulat bermakna bahwa bangsa Indonesia memiliki kekuasaan tertinggi untuk mengatur wilayah negara dengan tujuan menjamin keutuhan wilayah negara, kedaulatan negara dan ketertiban demi kepentingan kesejahteraan segenap bangsa (UU No. 43 Tahun 2008). Kedaulatan negara adalah kekuasaan negara untuk ditaati, atau memaksakan kehendaknya untuk ditaati rakyatnya (kedaulatan internal atau *interne souveriniteit*), serta kemampuan negara untuk mengadakan hubungan luar-negeri dan untuk menghadapi serangan dari luar-negeri (kedaulatan eksternal atau *externe souveriniteit*) (Bodin: 1567). Dengan demikian, kedaulatan NKRI merefleksikan bahwa masyarakat Indonesia yang dahulu hidup dalam penjajahan, kini telah memiliki status dan kemampuan untuk mengelola negaranya sendiri untuk tujuan yang telah ditetapkan, khususnya sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang dianugerahi dengan masyarakat yang plural dan memiliki heterogenitas etnik. Keberagaman tersebut secara horizontal ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku bangsa, agama, adat istiadat dan primordialisme. Dengan struktur sosial yang sedemikian kompleks, Indonesia dihadapkan kepada potensi ancaman permasalahan konflik antar etnik, kesenjangan sosial dan tantangan terhadap keutuhan NKRI. Dalam rangka menjaga keutuhan wilayah NKRI sebagai suatu bangsa dan negara yang berdaulat, Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai komponen utama Sistem Pertahanan Negara bersama rakyat telah melaksanakan beberapa upaya pertahanan negara. Upaya ini dimulai dari penumpasan pemberontakan pada peristiwa PKI di Madiun (1948), pemberontakan DI/TII (1950), Pembebasan Irian Barat (1961), Operasi

KRONOLOGIS KONFLIK DI PAPUA

A. LATAR BELAKANG PERLAWANAN BANGSA PAPUA

Perjalanan bangsa Papua dalam menentukan nasib sendiri memasuki babak baru saat persiapan kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam sidang BPUPKI tanggal 10 dan 11 Juli 1945, kepastian status Papua sebagai bagian wilayah Indonesia menjadi topik perdebatan alot di antara para pemimpin perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dalam pandangan Moh. Yamin, Soekarno dan Kahar Muzakar, strategi geopolitik Indonesia mengharuskan Papua terintegrasi dengan Indonesia, sekalipun secara etnografis bangsa Papua lain dengan bangsa Indonesia. Bahkan Soekarno menyatakan, jika ditilik dari sisi historis, dalam Nagarakertagama manuskrip kronik zaman Majapahit yang ditulis Mpu Prapanca Papua ternyata masuk dalam wilayah kerajaan Majapahit. Lagipula, Soekarno dan Muzakar sudah kadung kesengsem dengan kekayaan alam Papua yang menurut mereka tak ternilai harganya. Namun Moh. Hatta berbeda. Menurut beliau, pandangan Yamin, Soekarno dan kawan-kawan itu merupakan pandangan imperialis. Dengan melihat pendekatan etnografis, bangsa Papua itu bangsa Melanesia, bukan bangsa Polinesia yang mendiami sebagian besar wilayah Indonesia. Persoalan apakah Papua dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia atau tidak, menurut Hatta, bisa diserahkan kepada keputusan bangsa Papua sendiri (Febrianti, dkk: 2019).

Pada 27 Desember 1949, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia, namun Papua secara administratif masih di bawah naungan kerajaan Belanda. Merasa sudah terlalu lama mengeruk kekayaan alam di tanah Papua, Belanda merasa perlu memberikan kebebasan bagi bangsa Papua untuk menentukan nasibnya sendiri. Misi moril dekolonisasi pemerintah Belanda bertujuan untuk menyiapkan kemerdekaan Papua sebagai negara sendiri di bawah naungan Belanda. Merespon niat Belanda itu, kaum elit terdidik Papua merencanakan penentuan nasib sendiri melalui pembentukan *Nieuw Guinea Raad* yang diresmikan pada April 1951. Untuk merealisasikan misi dekolonialisasi Belanda, beberapa pentolan *Nieuw Guinea Raad* yaitu Nicolaas Jouwe dan kawan-

RESOLUSI KONFLIK DI PAPUA

A. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Rentetan peristiwa penembakan di Distrik Boega, Kabupaten Puncak Papua agaknya belum akan berakhir. Tragedi kembali terulang dengan gugurnya salah satu personil Brimob atas nama Bharada Komang, tidak lama setelah kejadian pada Minggu, 25 April 2021, yang menelan korban jiwa dimana peluru senjata milik Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) merenggut nyawa Jenderal bintang satu. Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Papua (Kabinda) Brigjen TNI I Gusti Putu Danny gugur di tengah baku tembak dengan KKB. Tidak dipungkiri bahwa sepak terjang KKB sudah sangat meresahkan masyarakat. Pembakaran, pembunuhan, dan pemerkosaan yang sering terjadi menjadikan trauma dan ketakutan tersendiri bagi masyarakat setempat. Bahkan 4 (empat) orang warga sipil yang terdiri atas 2 (dua) guru, seorang tukang ojek, dan seorang siswa SMA ikut menjadi korban kekejaman yang dilakukan oleh kelompok tersebut.

Atas beragamnya tindakan kekejaman tersebut, Presiden Jokowi pada akhirnya memerintahkan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit untuk menangkap dan menindak tegas seluruh anggota KKB. Meskipun menuai pro kontra namun kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi disambut baik oleh berbagai kalangan. Hal ini dikarenakan teror yang dilakukan oleh KKB sudah bukan merupakan kelompok kriminal bersenjata biasa, melainkan termasuk gerakan yang memiliki motivasi politik untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), bahkan dapat berpotensi terjerat pidana terorisme. Hal ini ditegaskan di dalam Pasal 1 ayat (2) UU No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan bahwa terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arianti P, Stepi. (2015). *Riset Intelijen di Papua*. Jakarta: Bais TNI.
- Chauvel, D. (2005). *Constructing Papua Nationalism: History, Ethnicity and Adaptation*. Washington: East-West Center.
- Creswell, Jhon W. (2016). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Departemen Pertahanan Republik Indonesia. (2008). *Buku Putih Pertahanan Indonesia*. Dephan : Jakarta
- Elisabeth, Adriana. (2017). *Updating Papua Road Map*. Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Elisabeth, Adriana. (2017). *Updating Papua Road Map*. Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Galula, David. (1964). *Counter Insurgency Warfare: Theory and Practice*. New York: Praeger 5 R.
- Golose , Petrus Reinhard. (2014). *Deradikalisasi Terorisme*. Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian: Jakarta
- Husserl, Edmun. (1982). *Ideas Pertaining To A Pure Phenomenology And To A Phenomenological Philosophy*. Den Haag: Martinus Nijhoff Publisher.
- King, P., Elmslie, J., & Webb-Gannon, C. (2011). *Comprehending West Papua*. Sydney: Centre for Peace and Conflict Studies, Universitas of Sydney.
- L. Wheelen, Thomas & J. David Hunger. (2010). *Strategic Management and Business Policy: Achieving Sustainability*. Upper Saddle River: N.J., Prentice Hall.
- McCormick. (2011). *The Complete Win dalam Freeman, Michael and Hy Rothstein* (ed). Gangs and Guerilla. Guardian News & Media. USA
- McCusker, K., & Gunaydin, S. (2015). *Research using qualitative, quantitative or mixed methods and choice based on the research*. Perfusion. DOI: 10.1177/0267659114559116
- Miles, Matthew B. and A. Michael Huberman. (2014). *Qualitative Data Analysis*. (terjemahan). Jakarta: UI Press

- Moleong, Lexy J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Penerbit PT Remaja Rosdakarya. Offset, Bandung.
- Muladi. (2002). *Demokrasi Hak Asasi Manusia Dan Reformasi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Habibie Center.
- Mulyana, Deddy. (2008). *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Oetzel, J. G., & Ting – Toomey, S. (2006). *The SAGE handbook of conflict communication: integrating theory, research, and practice*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Singiresu S Rao, John Wiley dan Sons. (2009). *Engineering Optimalization: Theory and Practice*. Fourth Edition.
- Siringoringo, Hotniar. (2005). *Pemograman Linear: Seri Teknik Riset Operasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Tim Prima Pena. (2015). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Gita Media Press.
- US Army TRADOC. (2007). *Military Guide to Terrorism*. US TRADOC: Kansas
- Widjojo, Muridan S. (2009). *Papua Road Map -Negotiating the Past, improving the Present and Securing the future*. Jakarta: Serpico.

JURNAL

- Febrianti, Sekar Wulan, Ajeng Sekar Arum, Windy Dermawan, Akim Akim. (2019). *Internal Conflict Resolution between Government of Indonesia and Separatist Movement in Papua using Horse-Trading Mechanism*. Society Journal. VOL 7 NO 2 (2019)
- Firmansyah, A. (2016). *Pandangan masyarakat terhadap konflik antar oknum perguruan silat (studi fenomenologi mengenai konflik antar oknum perguruan silat di Kabupaten Madiun)*. Sosial Antropologi, 5 (2),
- Kusumawardhani, Indriati, Afriansyah, Arie. (2020). *Free Papua Organization: Belligerent, Combatant, or Separatist?*. Conference: 3rd International Conference on Law and Governance (ICLAVE 2019). DOI: 10.2991/aebmr.k.200321.040
- Mambraku, N.S.T. (Juni 2015) *Penyelesaian Konflik di Tanah Papua dalam Perspektif Politik*. Kajian Vol 20 No. 2.

Miharja, Marjan & AL-Qamar S. Sangadji. (2019). *A View On Military Operations Against The Armed Separatists In Papua From The State Power Perspective*. Surakarta Law and Society Journal Vol. 1 No. 2.

UNDANG-UNDANG/PERATURAN:

Kep Panglima TNI Nomor Kep/555/VI/2018 tentang Doktrin TNI Tri Dharma Eka Karma.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Media Elektronik

BBC Indonesia (2021). *Papua: Penembakan di Intan Jaya membuat sekitar 600 warga 'mengungsi karena takut', mengapa konflik terus terjadi?* Diakses melalui <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56001504> pada 12 Mei 2021.

CNN Indonesia. (2020). *Otsus dan Api Konflik Papua di Tangan Pemerintah Pusat*. Diakses di <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200929140453-20-552252/otsus-dan-api-konflik-papua-di-tangan-pemerintah-pusat> pada 12 Mei 2021.

CNN Indonesia. (2021). *Pemerintah Resmi Tetapkan KELOMPOK TERORIS Papua Teroris*. Diakses di https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210429123128-12-636368/pemerintah-resmi-tetapkan-Kelompok_Terroris-papua-teroris pada 12 Mei 2021.

Detik. (2019). https://news.detik.com/berita/d-5367719/bupati-intan-jaya-keluar-daerah-karena-diancam-Kelompok_Terroris-ini-kata-kemendagri pada 12 Mei 2021.

Liputan 6. (2021). *Pemerintah resmi Tetapkan KKB Papua sebagai kelompok Teroris*. Diakses melalui <https://www.liputan6.com/news/read/4545278/pemerintah-resmi-tetapkan-kkb-papua-sebagai-kelompok-teroris> pada 12 Mei 2021

- Scott Moore. (2007). *The Basics of Insurgency* dalam <http://smallwarsjournal.com>, 8 September 2007., pada 12 Mei 2021.
- Tribun News (2021). <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/05/19/mahfud-md-pemerintah-belum-pernah-terpikir-berlakukan-darurat-sipil-atau-darurat-militer-di-papua>, pada 12 Mei 2021.
- Widadio, N.A. & Latief, M.N. 2019. Riwayat Konflik Papua, Tanah Kaya di Ujung Timur Indonesia. Diakses di <https://www.aa.com.tr/id/berita-analisis/riwayat-konflik-papua-tanah-kaya-di-ujung-timur-indonesia/1635906> pada 12 Mei 2021.

OPTIMALISASI SINERGITAS TNI, POLRI DAN KEMENTERIAN/LEMBAGA

Dalam Penanggulangan Kelompok Teroris Papua Guna Mewujudkan Keutuhan NKRI

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang dianugerahi dengan masyarakat yang plural dan memiliki heterogenitas etnik. Keberagaman tersebut secara horizontal ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku bangsa, agama, adat istiadat dan primordialisme. Dengan struktur sosial yang sedemikian kompleks, Indonesia dihadapkan kepada potensi ancaman permasalahan konflik antar etnik, kesenjangan sosial dan tantangan terhadap keutuhan NKRI. Situasi keamanan di Papua belakangan ini kembali menunjukkan eskalasi dan cenderung memanas. Situasi keamanan yang meningkat di wilayah Papua menjadi urgensi diperlukannya pendekatan yang komprehensif antara TNI, Polri, Satkowil, Pemda, K/L untuk bersinergi dalam rangka meredam konflik Papua. Sinergisitas antara lembaga / kementerian telah terselenggara baik dalam bentuk dialog, pendekatan *soft power* dalam kerangka OMSP, maupun pemberdayaan terhadap masyarakat setempat dengan bersinergi bersama pemerintah lokal. Namun, dengan masih berlangsungnya konflik dan beberapa eskalasi yang terjadi, hal ini menunjukkan sinergisitas tersebut masih belum cukup optimal.